BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV tentang bagaimana implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Kegunaan

   Implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terbukti meningkatkan kinerja, efisiensi, akurasi data, dan koordinasi lintas OPD melalui fitur otomatis dan basis data tersentralisasi. Namun, persepsi kegunaan ini belum terealisasi secara mutlak akibat alur birokrasi pengesahan yang masih memerlukan cetak berkas dan tanda tangan basah secara manual karena belum diadopsinya Tanda Tangan Elektronik.

2. Persepsi kemudahan

   Sistem perencanaan berbasis elektronik dirasakan sangat mudah digunakan oleh operator perencana maupun pimpinan berkat antarmuka yang intuitif, tersedianya panduan teknis, otomatisasi fitur, serta dukungan komunikasi informal antar-operator tanpa terhambat latar belakang pendidikan non IT. Dari sisi manajemen puncak, kemudahan ini terwujud melalui dashboard pemantauan real-time yang memangkas alur

pelaporan manual serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan.

3. Keunggulan Relatif

Sistem elektronik memberikan keunggulan relatif yang signifikan dibanding sistem manual, seperti percepatan waktu penyusunan dokumen (2–3 kali lebih cepat), efisiensi biaya operasional (penghematan ATK dan SPPD), peningkatan akurasi data, serta penguncian program untuk mencegah usulan titipan. Meskipun demikian, manfaat ini belum dirasakan optimal oleh operator akibat kendala stabilitas jaringan, durasi verifikasi SSH yang lambat, serta ketiadaan fitur koreksi otomatis yang mengharuskan penghapusan dan penginputan ulang data jika terjadi kesalahan.

4. Kesesuaian

Sistem ini memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap regulasi (seperti Permendagri No. 90/2019 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317/2023), budaya kerja, visi *Smart Government*, serta efektivitas dalam mengunci usulan program sisipan. Kendati demikian, adopsi sistem sempat mengalami hambatan sementara akibat dinamika regulasi dan perubahan nomenklatur perencanaan daerah yang memicu inkonsistensi antara dokumen Renstra dan Renja sehingga memerlukan penyesuaian ulang data.

5. Kompleksitas

Tingkat kompleksitas sistem tergolong tinggi yang bersumber dari keharusan penginputan ganda pada aplikasi SIPD dan *e-Planning* yang belum terintegrasi, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kompleksitas tersebut semakin diperberat oleh tata kelola data operasional, seperti lambatnya verifikasi SSH, ketiadaan fitur koreksi langsung, serta ketidaksesuaian pengelompokan rekening belanja yang menuntut kecermatan ekstra staf perencana.

6. Kemudahan diamati

Implementasi sistem mampu menghasilkan output dokumen perencanaan (seperti DPA) yang jelas, transparan, dan rinci sehingga memudahkan verifikasi pembayaran oleh bagian keuangan. Namun, dampak positif dan manfaat kepraktisan dari transparansi digital ini belum sepenuhnya diimbangi oleh perubahan budaya kerja organisasi karena operasional di lapangan masih bergantung pada dokumen fisik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi strategis yang diusulkan untuk mengoptimalkan Implementasi Sistem Perencanaan berbasis Elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Kementerian Dalam Negeri meliputi:
    a. Perlu dukungan kebijakan meyediakan dan membuka akses agar aplikasi *e-Planning* dapat tersingkron otomatis.
    b. Melakukan peningkatan kapasitas bandwidth dan menyediakan server cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penggunaan jaringan internet saat memasuki masa penginputan seluruh instansi se Indonesia.
    c. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi yang belum 100% digital karena masih adanya penandatanganan manual pada dokumen output aplikasi.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:
    a. Diskominfo pemprov Sul-Sel mengoptimalkan bandwidth atau jalur internet khusus untuk ruang perencanaan SKPD dan pastikan mendapatkan informasi terupdate jadwal penginputan dan batas waktunya.
    b. Bapelitbangda membangun jembatan data otomatis antar-aplikasi agar data sekali input langsung sinkron.
    c. Menerbitkan regulasi terkait Tanda Tangan Elektronik pada dokumen perencanaan untuk memotong jalur birokrasi yang terlalu lama sehingga adopsi SPBE bisa maksimal

d. Biro Barjas membuat sistem sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengelompokan Standar Satuan Harga dan SSH sesuai dengan tahun pengusulan.

3. Staf Perencanaan (operator perencanaan) meningkatkan ketelitian dan koordinasi yang terstruktur sehingga dokumen perencanaan berdasarkan usulan yang mengakomodir peningkatan derajat kesehatan.

C. Produk Tesis

Karya tesis dalam penelitian ini berupa *Policy Breaf* dan surat telaan yang dapat memberikan masukan kepada pimpinan terkait Implementasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kendala-kendala yang di hadapi selama ini dapat terselesaikan dan memudahkan bagian perencanaan untuk meneylesaiakn pekerjaannya dan terhindar dari temuan-temuan akibat kesalahan teknis pada proses perencanaan.

Produk tesis ini memberikan kejelasana masalah-masalah yang terjadi serta solusi yang ditawarkan meliputi (1) Membangun jembatan data otomatis antar-aplikasi agar data sekali input langsung sinkron, (2) Peningkatan kapasitas server dan pembagian jadwal input per sektor/wilayah, (3) Membuat sistem sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengelompokan Standar Satuan Harga dan SSH sesuai dengan tahun pengusulan, (4) Mengadopsi

Tanda Tangan Elektronik resmi untuk memotong birokrasi dan mewujudkan *paperless*.

Saya memilih Policy Brieaf dan Telahan Penelitian karena latar belakang di level daerah sering sekali berkisar pada ego sektoral dan kurangnya integrasi aplikasi. Buku tesis ini jarang dibaca oleh para pengambil kebijakan, telaah staf adalah instrumen birokrasi legal yang digunakan di internal pemerintahan untuk khusus pemprov sulsel sebagai wujud tindakan nyata dari pimpinan secara cepat.